



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BELU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIKOLAUS UMBU KUNDJI BIRRI
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 740300

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 40.000.000

1. Tanah Seluas 831 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.124.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN Tahun
2003, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BK8 M/T SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
24.124.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.255.279

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 202.879.279

III. HUTANG Rp. 132.873.052

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 70.006.227

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.